



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.00- 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR: HK.00.00-18 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.00/291/B/BUPATI/2025 hal permohonan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 tanggal 16 Juni 2025 sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas Keputusan DPRD Nomor: HK.00.00-18 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
 - b. bahwa sesuai hasil rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Belitung Timur dengan Kepala Bagian Hukum serta Kepala Perangkat Daerah terkait tanggal 30 Juni 2025 disepakati perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun 2025;
 - c. bahwa penetapan perubahan kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR: HK.00.00-18 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.
- KESATU : Merubah Lampiran pada Keputusan DPRD Nomor: HK.00.00-18 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Juli 2025

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,



FEZZI UKTOLSEJA

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		PD PENGUSUL	TARGET PENYAMPAIAN
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan/ Keterangan		
1	2	3	4	5		6	-	7	8	9
1	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi	Perubahan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2021 yaitu: - menghapus ketentuan Pasal 5 huruf J - menghapus ketentuan ketentuan Pasal 16	-	✓	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah	-	✓	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Triwulan I
2	Perda	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	a. prinsip penyelenggaraan KLA b. strategi penyelenggaraan KLA c. pemenuhan hak anak d. penyelenggaraan KLA e. tanggungjawab pemerintah daerah f. peran serta masyarakat g. partisipasi anak h. penyelenggaraan layanan rumah anak	✓	-	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang Nomor 23 Tahun 2002	✓	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Triwulan I

			i. pembinaan dan pengawasan		tentang Perlindungan Anak 2. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak					
3	Perda	Perubahan Atas Daerah Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Perubahan ketentuan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	√	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman	-	√	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan I

					Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah					
4	Perda	Pertanggungjawabann Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawabann pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	√	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan II
5	Perda	Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	a. ketentuan umum dan b. program kepersertaan	√	-	1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang	√	-	DPRD	Triwulan II

		c. peran pemerintah daerah d. program perlindungan pekerja rentan e. pembinaan dan pengawasan f. pembiayaan g. sanksi			Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial				
6	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	✓	-	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	✓	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan II
7	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	-	✓	-	-	✓	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan II
8	Perda	Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2045	✓	-	-	✓	-	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Triwulan III
9	Perda	Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	✓	-	Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	✓	-	Dinas Lingkungan Hidup	Triwulan III

10	Perda	Perubahan Atas Daerah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika	Menghapus ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggara pos, telekomunikasi, dan penyelenggaraan saran komunikasi	-	✓	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	-	✓	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Triwulan III
11	Perda	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	a. Ketentuan umum b. Ruang lingkup riset c. Inovasi daerah d. Koordinasi dan sinkronisasi e. Ekosistem riset dan inovasi daerah f. Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi g. Perlindungan hak kekayaan intelektual h. Penilaian dan penghargaan i. Penyebaran riset dan inovasi daerah j. Pendanaan riset dan inovasi daerah k. Pembinaan dan pengawasan	✓	-	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Inovasi Daerah	✓	-	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Triwulan III

12	Perda	Strategi Promosi dan Penanaman Modal	a. Ketentuan umum b. Tujuan dan sasaran promosi penanaman modal c. Strategi promosi penanaman modal d. Penyediaan sarana promosi e. Pelaksanaan kegiatan promosi f. Koordinasi promosi g. Peran tanggungjawab h. Ketentuan peralihan i. Ketentuan penutup	√	-	3. Peraturan BRIN Nomor 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal	√	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan III
13	Perda	Penyelenggaraan Tanggung Sosial Lingkungan Perusahaan dan	- Peran Perusahaan dalam meningkatkan perekonomian daerah. - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPL) merupakan bentuk tanggung jawab Perusahaan dalam membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	√	-	DPRD Triwulan III

14	Perda	Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur	a. Pembentukan Badan; b. Penggabungan Perangkat Daerah/Dinas	-	√	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	-	√	Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Bagian Organisasi)	Triwulan IV
15	Perda	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang	√	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan IV
16	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	√	-	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang	√	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Triwulan IV

						undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,


FEZZI UKTOLSEJA